

**SKRIPSI**

**PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI  
PENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)  
(STUDI KASUS PADA KPPBC NGURAH RAI)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : TASYA ALYA SALSABILA  
NIM : 1815644099**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

**PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI  
PENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)  
(STUDI KASUS PADA KPPBC NGURAH RAI)**

**TASYA ALYA SALSABILA  
1815644099**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

*Whistleblowing system* merupakan suatu sistem yang dibentuk untuk memfasilitasi orang yang ingin melaporkan indikasi kecurangan/pelanggaran (orang yang meniup peluit). Kecurangan/pelanggaran umumnya dilakukan karena adanya dorongan, peluang, serta rasionalisasi sehingga kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Melalui *whistleblowing system* yang diharapkan mampu meningkatkan keinginan dan keberanian siapapun untuk berani melapor sehingga kecurangan/pelanggaran dalam instansi/perusahaan dapat terdeteksi sedini mungkin (*early warning*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan yang dipilih merupakan pihak internal KPPBC Ngurah Rai yaitu Seksi Kepatuhan Internal dan Seksi Perbendaharaan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk mendapatkan data yang valid, dengan metode ini dipastikan kesesuaian hasil wawancara dengan hasil observasi, dokumentasi dan jurnal-jurnal yang relevan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai dapat mendeteksi kecurangan/pelanggaran yang dibuktikan dari diterimanya berbagai pengaduan. Hasil dari penelitian ini adalah telah dilaksanakannya mekanisme penanganan setiap pengaduan sesuai dengan pedoman kerja/Standar Operasional Prosedur (SOP), baik pengaduan melalui saluran SIPUMA dan NON-SIPUMA. Saluran SIPUMA dapat diakses melalui *website* dan saluran NON-SIPUMA juga dapat diakses melalui *website*, *e-mail*, telepon & fax, *Whatsapp*, maupun pengaduan langsung dengan mendatangi ke kantor.

Selain itu dalam pelaksanaannya, KPPBC Ngurah Rai telah menerapkan prinsip-prinsip *whistleblowing* sesuai kajian teoritis. Serta telah memberikan perlindungan kepada pelapor dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hasil penelitian ini memberikan implikasi secara teoritis maupun praktik. Secara teoritis, dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan maupun insitusi lainnya untuk menerapkan *whistleblowing system* yang terintegrasi sehingga dapat membantu dalam mendeteksi indikasi kecurangan/pelanggaran secara dini (*early warning*). Implikasi praktis, penelitian ini dapat memberikan pertimbangan agar orang lebih berani melaporkan kecurangan/pelanggaran yang diketahui.

**Kata kunci:** *whistleblowing system*, pelapor, kecurangan/pelanggaran, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)

**THE IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM AS  
FRAUD DETECTION  
(A CASE STUDY AT KPPBC NGURAH RAI)**

**TASYA ALYA SALSABILA  
1815644099**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Whistleblowing system was formed to facilitate people who want to report indications of fraud/violation (whistleblower). Fraud/violations are generally carried out because of encouragement, opportunity, and rationalization, so fraud can be committed by anyone, anytime, and anywhere. Through the whistleblowing system, it is expected to be able to increase the desire and courage of anyone to dare to report. So the fraud/violations within the company or institution can be detected as soon as possible (early warning). This research is a descriptive qualitative research, which means data will be collected through in-depth interviews, observation, documentation, and literature study. The selected informants are the internal parties of KPPBC Ngurah Rai, The Internal Compliance Section and The Treasury Section. This research uses the triangulation method to get valid data and to check the congruency of the interview, observation, documentation and relevant journals.*

*In conclusion, the whistleblowing system at KPPBC Ngurah Rai can detect fraud/violations that has been proven by the receipt of various complaints. The result of the research is that the mechanism for managing each complaint has been implemented in accordance with Standard Operating Procedure, both complaints through the SIPUMA and NON-SIPUMA channels. SIPUMA channel can be accessed via website and NON-SIPUMA channel can also be accessed via website, e-mail, telephone & fax, Whatsapp, or direct complaints by visiting the office. In addition, in its implementation, KPPBC Ngurah Rai has applied the principles of whistleblowing according to theoretical studies and has provided protection for whistleblower by keeping their identity confidential. Furthermore, the research result brings implications both theoretical and practical. Theoretically, it could be a consideration for companies and other institutions to implement an integrated whistleblowing system, so that it can assist in detecting indications of fraud/violation early. On practical implication, this research could be a consideration for the people so that they more courageous to report fraud/violations they know about.*

**Keywords:** *whistleblowing system, whistleblower, fraud/violations, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)*

**PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI  
PENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*)  
(STUDI KASUS PADA KPPBC NGURAH RAI)**

**SKRIPSI**

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan  
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : TASYA ALYA SALSABILA**

**NIM : 1815644099**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Tasya Alya Salsabila  
NIM : 1815644099  
Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Penerapan *Whistleblowing System* Sebagai  
Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*) : Studi Kasus pada  
KPPBC Ngurah Rai  
Pembimbing : Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, MM., Ak.  
Luh Nyoman Chandra Handayani, SS., DEA.  
Tanggal Uji : 9 Agustus 2022

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 16 Agustus 2022



Tasya Alya Salsabila

## SKRIPSI

### PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI PENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) (STUDI KASUS PADA KPPBC NGURAH RAI)

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : TASYA ALYA SALSABILA  
NIM : 1815644099

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II



Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak.  
NIP. 19610306 198910 1 001

Luh Nyoman Chandra Handayani, SS., DEA.  
NIP. 19710120 199412 2 002

JURUSAN AKUNTANSI  
KETUA



I Made Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 19611228 199003 1 001



## SKRIPSI

### PENERAPAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* SEBAGAI PENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) (STUDI KASUS PADA KPPBC NGURAH RAI)

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian pada:

Tanggal 9 Agustus 2022

Panitia Penguji

KETUA :

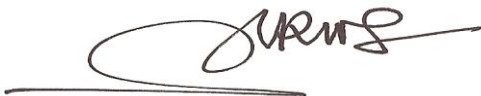


Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak.  
NIP. 196103061989101001

ANGGOTA :



2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E, M.Agb., Ak.  
NIP. 198101152006042002



3. Drs. I Wayan Purwanta Suta, MAIB.  
NIP. 195812311987031013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial di Politeknik Negeri Bali. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, SE., M.eCom, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Sudana, SE, M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Cening Ardina, SE., M.Agb, selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Politeknik Negeri
4. Drs. Ec. Ida Bagus Anom Yasa, M.M., Ak, selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS., DEA, yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini.
6. Instansi dan informan (Pak Haldy, Pak Heru, Pak Aldimas) atas perspektif, kedermawanan, kejujurannya dalam memberikan informasi dan data yang saya perlukan serta Mas Rakhmad sebagai narahubung antara saya dengan informan.
7. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan material dan moral
8. Teman-temanku yang menjadi *support system*, Ayumas, Mita, Ryan, Gitan, Mila, dan Kak Bagus yang selalu ada di saat saya sangat membutuhkan mereka.
9. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah mendidik dan membina saya selama mengikuti perkuliahan pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Akhir kata, saya berharap agar Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Badung, 16 Agustus 2022



Tasya Alya Salsabila



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasayarat Gelar Sarjana Terapan .....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinilitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Teori .....	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	16
C. Alur Pikir .....	23
D. Pertanyaan Penelitian .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data (Subjek dan Objek Penelitian) .....	27
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	27
E. Keabsahan Data .....	29
F. Analisis Data.....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan dan Temuan.....	67
C. Keterbatasan Penelitian.....	80

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>82</b>
A. Simpulan .....	82
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>95</b>



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian yang Relevan .....	18
Tabel 4. 1 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan.....	63
Tabel 4. 2 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Saluran Pengaduan.....	66



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian.....	25
Gambar 3. 1 Tahap Analisis Data Kualitatif.....	33
Gambar 4. 1 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Klasifikasi Pengaduan .....	65



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Tampilan Saluran SIPUMA

Lampiran 3: *Flowmap* Mekanisme Penanganan Pengaduan Saluran SIPUMA

Lampiran 4: Tampilan Saluran NON-SIPUMA

Lampiran 5: *Flowmap* Mekanisme Penanganan Pengaduan Saluran NON-SIPUMA

Lampiran 6: Gambaran Umum KPPBC Ngurah Rai

Lampiran 7: Struktur Organisasi KPPBC Ngurah Rai

Lampiran 8: Dokumentasi Foto dengan Informan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kondisi ekonomi yang semakin memburuk akibat krisis pandemi Covid-19 semakin membuka peluang bagi pelaku kecurangan (*fraud*) untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Hasil survei yang dilakukan oleh RSM Indonesia (2020) memperoleh hasil bahwa 80% responden menyatakan kecurangan (*fraud*) meningkat secara drastis selama masa pandemi Covid-19, selanjutnya 35% responden menyatakan bahwa penyelewengan aset terjadi pada perusahaan mereka selama pandemi Covid-19, serta 56% responden menyampaikan pendapatan perusahaan mereka terpengaruh akibat keberlangsungan pandemi Covid-19.

Kecurangan dibagi ke dalam beberapa kategori yakni penyalahgunaan aset perusahaan (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*), korupsi (*corruption*), kecurangan berdasarkan frekuensi, kecurangan berdasarkan konspirasi, dan kecurangan berdasarkan keunikan (Mulford, 2014). *Fraud* merupakan suatu bentuk kecurangan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan tersebut (Fitriyah et al., 2020). Tindakan *fraud* umumnya terjadi akibat faktor tekanan, dorongan untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan rasionalisasi dari tindakan (Paranoan, 2019). Berbagai tindak kecurangan (*fraud*) pun didukung dengan sinergitas antara sifat kerahasiaan (*secret*) dan aksi tutup



mulut (*silence*) yang dilakukan para pihak yang terlibat.

Hingga saat ini kasus penipuan dan pelanggaran selalu menjadi perbincangan hangat bahkan menjadi pemberitaan di media massa. Seperti dilansir situs *Federal Bureau of Investigation* (FBI), potensi nilai kasus penipuan terkait Covid-19 ini mencapai 5 juta USD atau setara Rp 79,4 miliar (Rahma, 2020). Potensi kecurangan ini muncul karena mekanisme pasti penggunaan dana selama dan setelah pandemi tidak diketahui (Rahma, 2020). Kecurangan dapat terjadi di berbagai sektor bisnis, baik sektor pemerintah, swasta, bahkan organisasi masyarakat juga terlibat di dalamnya (Spink, 2017). Terdapat beberapa kasus yang sempat menjerat pejabat publik dalam kurun waktu lima tahun terakhir, diantaranya korupsi oleh Juliari Peter Batubara menerima suap senilai Rp 17 miliar dari dua paket bantuan sosial penanganan Covid-19 yang diperoleh dari pemotongan biaya Rp 10.000 per paket bansos (BBC, 2020). Kasus penipuan lainnya juga dilakukan pegawai dan direksi PT Kimia Farma Apotek yang menggunakan antigen bekas kepada 9.000 orang sejak Desember 2020 (Lidyana, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa kecurangan/pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam kondisi apapun.

Tingginya angka kejahatan penipuan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil pra survei pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai terjadi peningkatan atas jumlah pengaduan tepatnya terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 174 pengaduan, khususnya

pengaduan atas penipuan. Namun, jika ditarik dari lima tahun ke belakang KPPBC Ngurah Rai hanya fokus dalam menangani pengaduan terkait penyimpangan sistem dan prosedur (operasional) dan pelanggaran kode etik pegawai (non-operasional). Peningkatan jumlah pengaduan tersebut bahkan menjadi perhatian bagi KPPBC Ngurah Rai. Jika peningkatan jumlah pengaduan dikaitkan dengan dimulainya pandemi Covid-19 di Indonesia mengindikasikan bahwa kecurangan atau penipuan tersebut merupakan dampak dari kondisi pandemi. Adanya sistem *lockdown* dan penerapan protokol kesehatan mempengaruhi waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman logistik serta adanya larangan ekspor dan impor beberapa komoditas tertentu semakin menggencarkan terjadinya kecurangan atau penipuan.

Tidak banyak oknum yang bersifat nakal atau bersifat acuh (cuek) kepada perusahaan, namun meski jumlahnya hanya segelintir dapat mengganggu pihak lainnya dan dapat menjadi racun bagi pihak yang kurang pendirian. Jika faktor-faktor pendukung tersebut terus berkembang tanpa penanganan mengakibatkan timbulnya resistensi bahkan kerusakan terhadap nilai-nilai etika serta norma yang telah ditetapkan dalam organisasi. Seakan-akan hal tersebut dianggap sebagai perilaku yang wajar dan lazim terjadi (banalitas). Pertimbangan untuk memutuskan “bersuara atau tidak” dan “konflik nilai” antar aktor merupakan permasalahan yang sarat dengan dilema sekaligus tantangan etika di dalam organisasi (Nurhidayat, 2020).

Regulasi perlindungan bagi pelapor sudah diterapkan di Indonesia yang

diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal serupa juga telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Namun, pada kenyataannya regulasi yang diterapkan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mendorong karyawan untuk mengungkapkan kecurangan/pelanggaran yang mereka ketahui. Pendapat ini juga didukung atas survei yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2018) yang menyimpulkan bahwa hampir satu dari tiga karyawan telah sadar akan adanya kecurangan/pelanggaran pada tempat kerjanya, namun hanya 54% karyawan yang menyadari pelanggaran tersebut mau untuk mengungkapkannya.

Karyawan beralasan bahwa ketidakinginan mereka untuk mengungkapkan kecurangan/pelanggaran dikarenakan tidak percaya bahwa manajemen akan mengoreksi hal tersebut. Alasan lainnya adalah jika karyawan mengungkapkan kecurangan/pelanggaran tersebut akan dapat membahayakan pekerjaannya (*Institute of Business Ethics*, 2018). Meskipun kasus *whistleblowing* mulai terbuka di Indonesia, namun masih ditemukan beberapa hal yang menjadi hambatan berkembangnya budaya *whistleblowing*. Pertama, hukum mengenai penjaminan perlindungan terhadap *whistleblower* yang masih bersifat umum dan tidak mengikat terhadap saksi, pelapor dan korban. Kedua, belum adanya pemahaman dan perspektif bersama aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan belum

tersosialisasi di tingkat bawah maupun daerah. Ketiga, pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* yang kurang maksimal karena hakim masih mengabaikan rekomendasi aparat penegak hukum terhadap status seseorang sebagai *whistleblower*. Pelapor sering dianggap “tidak sah” dan tidak loyal oleh orang-orang di tempat kerja, meskipun ada upaya simultan untuk mendukung dan mendorong pengungkapan melalui peningkatan perlindungan hukum (Stolowy et al., 2019).

Upaya dalam menyikapi hal tersebut, manajemen harus berhati-hati dan memiliki pemahaman terhadap kemungkinan terjadinya *fraud* serta melakukan tindakan pencegahan sedini mungkin (Surbhi, 2019). Salah satu upaya pencegahan dan pengawasan internal dengan menerapkan suatu sistem pendeteksi tindak kecurangan (*fraud*) yakni *whistleblowing system*. KPPBC Ngurah Rai sebagai salah satu instansi pemerintah dibawah naungan Kementerian Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan yakni Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Berpedoman pada nilai-nilai tersebut mendorong KPPBC Ngurah Rai menerapkan *whistleblowing system* tersendiri yang diterapkan pada tahun 2012 atas dasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.09/2010 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 149/KMK.09/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) serta Tata Cara Pelaporan dan Publikasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing*) di

Lingkungan Kementerian Keuangan.

*Whistleblowing* mengacu pada upaya yang dilakukan karyawan atau mantan karyawan untuk mengungkapkan sesuatu yang diyakini sebagai kesalahan yang terjadi di tempatnya bekerja untuk mencegah kasus penipuan pelaporan keuangan yang merugikan perusahaan itu sendiri maupun pihak lain (Rianti, 2017). Tindakan *whistleblowing* dapat mengungkapkan informasi dari sebuah organisasi privat ataupun publik untuk membuka kasus-kasus korupsi yang berbahaya kepada publik (Kumar dan Santoro, 2017). Tindakan *whistleblowing* juga dapat dilakukan oleh individu, baik dari dalam maupun luar perusahaan (Fauziyah et al., 2021). Di sisi lain, *whistleblowing system* yang baik adalah dapat menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

Menurut survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam *Survei Fraud* Indonesia tahun 2019, mengungkapkan bahwa media pelaporan (*whistleblowing*) menduduki urutan pertama dalam pendeteksian kecurangan yakni sebesar 38,9%, kemudian pendeteksian melalui audit internal dengan persentase sebesar 23,4%, serta melalui audit eksternal sebesar 9,6%. ACFE juga senantiasa menempatkan pemberian tip pada peringkat teratas sebagai sumber pengungkapan kecurangan/penipuan (Bagustianto & Nurkholis, 2015). *Whistleblowing* muncul sebagai alat yang efektif untuk memfasilitasi deteksi kemerosotan nilai-nilai publik dan untuk mengatur intervensi tepat waktu yang bertujuan untuk memulihkan integritas organisasi sektor publik (Ciasullo et al., 2017).

Salah satu cara yang semakin umum untuk menyeimbangkan nilai transparansi dan akuntabilitas dengan perlindungan dan kerahasiaan data adalah dengan merancang prosedur pelaporan pelanggaran khusus dalam organisasi (Kagiaros, 2015; Kavathatzopoulos dan Asai, 2016). Mengingat modus penipuan yang semakin beragam seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi.

Berdasarkan atas fenomena dan hasil penelitian sebelumnya maka *whistleblowing system* sangat menarik untuk diteliti termasuk yang diterapkan pada KPPBC Ngurah Rai dalam mendeteksi terjadinya kecurangan atau pelanggaran. Tidak semua perusahaan atau instansi menerapkan *whistleblowing system* secara maksimal bahkan masih banyak yang belum menerapkannya. *Whistleblowing* yang diterapkan instansi belum maksimal dan terdapat kendala yang dihadapi karena risiko dibangun sesuai dengan prosedur dan kebijakan masing-masing instansi (*Institute for Criminal Justice Reform*, 2016), sehingga implikasi atas tindakan *whistleblowing* bergantung pada reaksi dari perusahaan/instansi sebagai tanggapannya kepada pelapor/pengadu. Perusahaan/instansi dapat memilih untuk menghentikan tindakan *whistleblowing* atau melanjutkan tindakan tersebut. Berdasarkan atas uraian dalam latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul “Penerapan *Whistleblowing System* sebagai Pendeteksi Kecurangan (*Fraud*): Studi Kasus pada KPPBC Ngurah Rai”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi beberapa



permasalahan penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah mekanisme *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai?
2. Bagaimanakah penerapan *whistleblowing system* sebagai pendeteksi kecurangan (*fraud*) pada KPPBC Ngurah Rai?

### C. Batasan Masalah

Dalam sebuah penelitian, hendaknya membatasi permasalahan yang diteliti agar tidak meluas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai sebagai pendeteksi kecurangan (*fraud*). Lingkup masalah yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah lingkup pelaporan, sistem layanan dan prosedur penanganan *whistleblowing*, sistem perlindungan *whistleblower*. Fokus atau ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan dan hal ini sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif (Aspers dan Corte, 2019).

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas, yaitu :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan mekanisme *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan *whistleblowing system* sebagai pendeteksi kecurangan (*fraud*) pada KPPBC Ngurah Rai.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengetahuan mengenai metode untuk pendeteksian kecurangan atau pelanggaran melalui *whistleblowing*.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan sebagai berikut:

#### 1) Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan ilmu audit, *whistleblowing*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengembangan lain yang relevan.

#### 2) Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pembanding bahan bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait penelitian sejenis di masa yang akan datang.

#### 3) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi KPPBC Ngurah Rai dalam peningkatan sarana dan prasarana *whistleblowing system* sebagai pendeteksi

kecurangan/pelanggaran terkhusus dari perspektif pegawai dan penelitian saat ini.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai ditunjukkan dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan melalui pedoman kerja/SOP, baik pengaduan melalui saluran SIPUMA dan NON-SIPUMA:
  - a. Mekanisme penanganan pengaduan kedua saluran tersebut hampir sama, namun pihak pertama yang menerima dan mengelola pengaduan berbeda. Pengaduan melalui saluran SIPUMA akan masuk pertama kali di DJBC pusat, kemudian dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal (KI) DJBC untuk dianalisis lebih lanjut tentang kelayakan pengaduan yang dapat diteruskan/ditindaklanjuti pada tingkat lokus pengaduan (kantor wilayah maupun kantor pelayanan). Lokus pengaduan juga akan menindaklanjuti pengaduan yang diterima dari Direktorat KI DJBC, termasuk juga bagi KPPBC Ngurah Rai.
  - b. Pengaduan yang masuk melalui saluran NON-SIPUMA dianalisis dan ditindaklanjuti secara langsung oleh Seksi Kepatuhan Internal (KI) KPPBC Ngurah Rai sebagai penerima pertama. Pengaduan yang masuk diteruskan kepada Kepala Seksi KI untuk menentukan pihak yang melanggar apakah pelaksana/pejabat. Kalau pelanggar adalah pelaksana, maka Kepala Seksi KI akan menandatangani konsep Nota

Dinas konfirmasi/ Surat Panggilan untuk didistribusikan kepada terlapor. Jika yang melanggar adalah pejabat maka kepala Seksi KI meneruskan kepada kepala kantor untuk diteliti dan ditandatanganinya Nota Dinas konfirmasi/ Surat Panggilan untuk didistribusikan kepada terlapor. Selanjutnya terlapor serta para saksi akan diperiksa dan dimintai keterangan oleh tim pemeriksa KI, sehingga terkumpul bukti yang sah. Atas bukti-bukti tersebut akan ditentukan bilik mana yang dilanggar serta rekomendasi hukuman yang tepat melalui konsep Nota Dinas Tindak Lanjut (NDTL) kepada unit terkait. Serta menyampaikan surat dinas (STL) terkait hasil penanganan/jawaban kepada pengadu/pelapor.

2. Penerapan *whistleblowing system* pada KPPBC Ngurah Rai telah mampu mendeteksi indikasi kecurangan/pelanggaran, karena:
  - a. *Whistleblowing system* yang diterapkan telah mampu merubah pola pikir orang dari *bystander* menjadi *whistleblower*, yang ditunjukkan adanya pengaduan yang diterima KPPBC Ngurah Rai yakni terkait penipuan, penyimpangan atas sistem & prosedur, serta pelanggaran atas sikap & perilaku. Jenis pengaduan yang terbanyak adalah pengaduan karena penipuan. Pengaduan yang masuk menunjukkan bahwa orang-orang sudah memiliki keberanian untuk melaporkan kecurangan/pelanggaran yang diketahui karena percaya bahwa KPPBC Ngurah Rai memberikan jaminan perlindungan identitas kepada pelapor dan selalu ditindaklanjutinya aduan/laporan tersebut.

- b. Penerapan *whistleblowing system* ini menjadi rambu-rambu bagi pegawai agar menghindari perilaku yang merugikan dirinya maupun organisasi, dapat menjadi antisipasi untuk mengendalikan personil perusahaan agar berperilaku sesuai dengan koridornya, patuh dengan kode etik perusahaan, karena sadar bahwa diawasi oleh rekan kerja mereka, sehingga dengan kesadaran ini saja mampu mendorong perilaku patuh karena risiko deteksi kecurangan/pelanggaran jauh lebih tinggi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan atas hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mahasiswa/Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga penelitian ini difokuskan pada satu objek (KPPBC Ngurah Rai). Penelitian selanjutnya disarankan agar mengembangkan penelitian pada sektor lainnya dan menambahkan informan yang tidak hanya dari dalam instansi, namun juga dari pihak luar seperti praktisi dan pihak yang terkait dengan pencegahan kecurangan, sehingga penelitian dapat digeneralisasikan.

2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ngurah Rai

Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan kepada KPPBC Ngurah Rai untuk lebih rutin mensosialisasikan pemahaman terkait *whistleblowing system* baik kepada pihak internal maupun eksternal instansi



sebagai sarana penyaluran pengaduan. Selain itu disarankan agar memperluas lingkup kebijakan/aturan terkait perlindungan kepada *whistleblower* (pelapor/pengadu) berupa perlindungan fisik maupun keberlangsungan karir. Serta mempertimbangkan pemberian imbalan ataupun ganti rugi kepada pelapor/pengadu yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi agar tidak berbalik menjadi bumerang dengan timbulnya laporan-laporan palsu yang sengaja dibuat pelapor/pengadu.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukkan kepada DJBC agar lebih memperjelas kebijakan/aturan terkait perlindungan kepada *whistleblower* (pelapor/pengadu). Selain itu disarankan agar DJBC menjalin kerjasama dengan aparat kepolisian terkait dengan penindaklanjutan pengaduan yang terbukti.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. W., & Hasma. (2017). Determinan Intensi Auditor Melakukan Tindakan Whistle-Blowing dengan Perlindungan Hukum Sebagai Variabel Moderasi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(3), 385 – 407.
- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Arianto, B. (2021). Media Sosial dan Whistleblowing. *Berkala Akuntansi dan Keuangan*, 6(1), 61–80. <https://doi.org/10.20473/baki.v6i1.25672>
- Aryanto, A. (20 September 2016). *Whistleblowing System Wujudkan Good Corporate Governance*. Warta Ekonomi. <https://www.wartaekonomi.co.id/read/2016>
- Asiah, N. (2017). Pengaruh Bystander Effect dan Whistleblowing terhadap Terjadinya Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Nominal*, 6(1), 109–123.
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Association of Certified Fraud Examiners. (2019). *Report to the Nations: Survei Fraud Indonesia 2019*. <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>
- Astuti, H. I. (2020). Pengaruh Personal Cost, Status Pelanggar, dan Pemberian Reward terhadap Niat untuk Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 11-30.
- Azhari, M. D., Biduri, S., Hermawan, S. (2021). Can Retaliation Moderate The Influence of Personal Cost, Professional Commitment And Ethical Environment On PNS Interest In Whistleblowing. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 366-382. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i2.16902>
- Azzahrah, M., & Hadinata, S. (2021). Peran Reward dan Komitmen Organisasi terhadap Niat Whistleblowing: Sebuah Studi Eksperimen. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 11-30.

- Bagustianto, R., & Nurkholis. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi pada PNS BPK RI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(1), 1-18.
- BBC Indonesia. (6 Desember 2020). *Mensos Juliari Batubara jadi tersangka korupsi bansos Covid-19, ancaman hukuman mati bakal menanti*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55204360>
- Brief, A. P. & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviors. *Academy of Management Review*, 11(4), 710–725.
- Ciasullo, M.V., Cosimato, S., & Palumbo, R. (2017). Improving health care quality: the implementation of Whistleblowing. *The TQM Journal*, 29(1), 167-183.
- Chang, Y., Wilding, M., & Shin, M. C. (2017). Determinants of Whistleblowing Intentions: Evidence from the South Korean Government. *Public Performance & Management Review*, 40(4), 1-25. <https://doi.org/10.1080/15309576.2017.1318761>.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study of The Social Psychology of Embezzlement*. Glencoe, IL: Free Press
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danuta, K. S. (2017). Crowe's Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-Procurement. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(2), 161–171. <http://dx.doi.org/10.33603/jka.v1i2.826>
- Dewi, K. Y. D., Dewi, P. E. D. M. D., & Sujana, E. (2018). Pengaruh bystander effect, whistleblowing, asimetri informasi, dan religiusitas terhadap kecenderungan kecurangan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Busungbiu. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(2), 130–147.
- Donthu, N., & Gustafsson, A. (2020). Effects Of COVID-19 On Business and Research. *Journal of business research*, 117, 284.
- Etikan, I. (2017). Sampling and Sampling Methods. *Biometrics & Biostatistics International Journal*, 5(6), 215-217. <https://doi.org/10.15406/bbij.2017.05.00149>
- Fatoki, O. (2017). Internal Whistleblowing Intention of Accounting Student in South Africa: The Impact of Fear of Retaliation, Materiality and Gender. *Journal of Social Sciences*, 37(1), 31-44. <https://doi.org/10.1080/09718923.2013.11893202>

- Fasterling, B., & Lewis, D. B. (2014). Leaks, Legislation, and Freedom of Speech: How Can The Law Effectively Promote Public-Interest Whistleblowing?. *International Labour Review*, 153(1) , 111-120. <https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2014.00197.x>
- Fauziyah, Z. P., Prabawani, B., & Dewi, R. S. (2021). Analisis Penerapan Whistleblowing Sytem pada PT Taspen. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 929-944.
- Fitriyah, F. K., Adrianto, Z., Irawady, C. (2020). The Internal Audit Role in Fraud Detection and Prevention. *International Journal of Innovation, Creativity, and Change*, 11(8), 491-499. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85081939345&origin=inward>
- Forddanta, D. H. (3 Desember 2020). *Waspada Fraud dan Penyelewengan Aset selama Pandemi*. Nasional Kontan. <https://nasional.kontan.co.id/news/waspada-fraud-dan-penyelewengan-aset-selama-pandemi>
- Gao, L., & Brink, A. G. (2017). Whistleblowing Studies in Accounting Research: A Review of Experimental Studies On The Determinants of Whistleblowing. *Journal of Accounting Literature*, 38, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.05.001>
- Gholami, H., & Salihu, H. A. (2019). Combating corruption in Nigeria: the emergence of whistleblowing policy. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 131–145. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0102>
- Guthrie, C. P., & Taylor, E. Z. (2017). Whistleblowing on Fraud for Pay: Can I Trust You?. *Journal of Forensic Accounting Research*, 2(1), A1-A19. <https://doi.org/10.2308/jfar-51723>
- Halim, D. (2020). *Total 575.796 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 6.089 orang*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/15343321/update-6-desembertotal-575796-kasus-covid-19-di-indonesia-bertambah-6089>
- Hapsari, A. N. S., & Seta, D. W. (2019). Identifikasi Kecurangan dan Whistleblowing Universitas. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 131-144. <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15424>
- Hemphill, M., & Richards, K. A. (2018). A practical guide to collaborative qualitative data analysis. *Journal of Teaching in Physical Education*, 37(2), 225–231.

- Hildayani, R & Sherly, V. (2021). Pengaruh Tekanan, Peluang, Rasionalisasi, dan Nilai Etika terhadap Intensi Kecurangan Karyawan: Studi Kasus pada Perusahaan BUMN. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)* , 3(4), 734-748. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.422>
- Horwarth, C. (2011). *The Mind Behind The Fraudsters Crime: Key Behavioral and Environmental Element*. USA: Crowe Horwarth International.
- Husniati, S., Hardi., & Wiguna, M. (2017). Faktor- Faktor yang mempengaruhi Intensi Untuk melakukan Whistleblowing Internal (Studi EMPIRIS Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 4(1), 1223-1237.
- Indahsari, R. (2016). Niat Individu Melakukan Whistleblowing: Theory of Planned Behavior dan Prosocial Behavior Theory. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 6(2), 1–19.
- Institute of Business Ethics. (5 Juli 2018). *Ethics at Work 2018 Survey of Employees: Europe*. <https://www.ibe.org.uk/resource/ethics-at-work-2018-europe.html>
- Institute for Criminal Justice Reform. (5 Maret 2017). *Review ICJR atas Ancaman dan Perlindungan Pelapor atau Whistleblower di 2016*. ICJR. <https://www.wartaekonomi.co.id/read/2016>
- Integrity. (2020). Apa itu Sistem Whistleblowing?. Integrity Indonesia. <https://www.integrity-indonesia.com/id/whistleblowing/>
- Isnadini, A. (2021). *Kualitas Pelayanan Pengaduan Masyarakat Melalui Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Lapor!) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. (Skripsi Administrasi Publik, Universitas Sumatera Utara)*. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38494/160903057>.
- Kagiaros, D. (2015). Protecting national security whistleblowers in the Council of Europe: an evaluation of three approaches on how to balance national security with freedom of expression. *The International Journal of Human Rights*, 19(4), 408-428.
- Kavathatzopoulos, I., & Asai, R. (2016). Judging the complexity of privacy, openness and loyalty issues. *Computers and Society*, 45(3), 416-419.
- Korstjens, I., & Moser, A. (2018). Practical Guidance to Qualitative Research. *European Journal of General Practice*, 24(1), 120–124. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375092>



- Kumar, M., & Santro, D. (2017). A Justification of Whistleblowing. *Philosophy and Social Criticism*, 43(7), 669–684. <https://doi.org/10.1177/0191453717708469>
- Kurniawati, F. N. (2021). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Niat Whistleblowing pada Karyawan Bank Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle>
- Langoday, K. S. M. (2021). Pengaruh Whistleblowing System dan Perilaku Etis terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 103–110.
- Latan, H., Ringle, C. M., & Jabbour, C. J. C. (2018). Whistleblowing intentions among public accountants in indonesia: Testing for the moderation effects. *Journal of Business Ethics*, 152(2), 573–588. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3318-0>
- Lidyana, V. (30 April 2021). *Kronologi Kasus Tes Antigen Bekas di Kualanamu hingga Pegawai Dipecat*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5552355/kronologi-kasus-tes-antigen-bekas-di-kualanamu-hingga-pegawai-dipecat>
- Maharani., & Mahmudah. H. (2021). Pengaruh Bystander Effect, Whistleblowing, dan Perilaku Etis terhadap Financial Statement Fraud. *Jurnal Paradigma*, 18(2), 24-31.
- Malek, J. (2015). To Tell or Not to Tell? The Ethical Dillema of the Would-Be Whistleblower. *Accountability in Research*, 17(3), 115-129. <https://doi.org/10.1080/08989621003791929>
- Masdiantini, P. R., Devi, S ., Purnamawati, I. G. A., & Dewi P. E. D. (2021). Detection of Financial Statement Fraud: In Review of Bystander Effect, Whistleblowing and Locus of Locus. *Economics, Business and Management Research*, 197, 495-500.
- Mulford, C. W. (2014). *Deteksi Kecurangan Akuntansi-The Financial Numbers Game*. Bandung: PPM Manajemen.
- Murti, U. P. (2020). *Pengaruh Insentif dan Retaliasi terhadap Intensi untuk Melakukan Whistleblowing: Studi pada KPP Pratama di Indonesia. (Skripsi Akuntansi, STIE YKPN Yogyakarta, Yogyakarta)*. <http://repository.stieykpn.ac.id/1286>
- Musmulyadi & Sari, F. I. (2020). Whistleblowing System dalam Memutus Rantai Fraud Untuk Mewujudkan Economic Growth: Studi pada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Syariah*, 3(2), 292– 303. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.198>



- Natow, R. S. (2020). The use of triangulation in qualitative studies employing elite interviews. *Qualitative Research*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.1177/1468794119830077>
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational dissidence: the case of whistleblowing. *Journal of Business Ethics*, 4, 1-16.
- Noviyanti, N. L. P., Rustiarini, N. W., & Dewi, N. P. S. (2021). Do Individual Characteristic and Bystander Effect Increase the Accounting Fraud?. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(2), 321-334.
- Nurhalizah. (2019). *Hubungan antara Bystander Effect dengan Perilaku Prosocial pada Mahasiswa Fakultas Psikologi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Medan Area (Skripsi Akuntansi, Universitas Medan Area, Medan)*. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/11354/1/158600180%20%20>
- Nurharjanti, N. N (2017). Persepsi Mahasiswa dalam Mengurangi Fraud Akademik: Whistleblowing Sistem. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 17(1), 1-12. <http://dx.doi.org/10.20961/jab.v17i1.218>
- Nurhidayat, I. (2020). Diskursus Konflik Nilai (Clash of Value) dan Dilema Etika dalam Kasus Whistleblowing. *Jurnal Pengawasan*, 2(2), 1-12.
- Nurhidayat, I., & Kusumasari, B. (2019). Why would whistleblowers dare to reveal wrongdoings?: An ethical challenge and dilemma for organisations. *International Journal of Law and Management*, 61(3-4), 505-515. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-11-2018-0253>
- Paranoan, N. (2019). Fraud Prevention in Bourdieu Thoughts. *Journal of Critical Reviews*, 6(5), 46-50. <https://doi.org/10.22159/jcr.06.05.08>
- Peltier-Rivest, D. (2018). The battle against fraud: do reporting mechanisms work?. *Journal of Financial Crime*, 25(3), 784-794. <https://doi.org/10.1108/JFC05-2017-0048>
- Pramudyastuti, O. L., Rani, U., Nugraheni, A. P., & Susilo, G. F. A. (2021). Pengaruh Penerapan Whistleblowing System terhadap Tindak Kecurangan dengan Independensi sebagai Moderator. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 115-135.
- Putra, A. M., Lestira, M., & Maemunah, M. (2017). Pengaruh Audit Investigasi dan Efektivitas Whistleblowing System terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survei pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara di Kota Bandung). *Prosiding Akuntansi*, (pp. 183 - 187). Bandung.
- Rahma, P. A (2020). *Waspada Potensi Fraud Dalam Masa Pandemi COVID-19*.

<https://www.mutupelayanankesehatan.net/19-headline/3414-waspada-potensi-fraud-dalam-masa-pandemi-covid-19>

- Rianti, D. (2017). Pengaruh Komitmen Profesional Auditor Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing dengan Retaliasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada BRI Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 4(1), 1531-1543.
- Riantika, R. L. (2021). Anti Fraud dan Whistleblowing Intention: Peran Intensitas Moral dan Pengambilan Keputusan Etis. *Jurnal Accounting and Financial Review*, 4(1), 95-106. <https://doi.org/10.26905/afr.v4i1.5957>.
- RSM. (2020). *Survei Fraud selama Pandemi Covid-19*. RSM Indonesia. <https://www.rsm.global/indonesia/en/insights/special-reports/implicationpandemic-fraud-risk>.
- Saputra, B., & Dwita, S. (2018). Pengaruh Retaliation dan Gender terhadap niat melakukan Whistleblowing. *Wahana Riset Akuntansi*, 6(2), 1233-1254. <https://doi.org/10.24036/wra.v6i2.102509>
- Sari, R. C. (2018). *Akuntansi Keprilakuan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Satyasmoko, A., & Suwarjuwono, T. (2021). Sistem Whistleblowing Dalam Penanganan Kasus Penyelewengan Etika. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 1-18.
- Seifert, D. L., Stammerjohan, W. W., & Martin, R. B. (2014). Trust, organizational justice, and whistleblowing: A research note. *Behavioral Research in Accounting*, 26(1), 157-168. <https://doi.org/10.2308/bria-50587>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. (6<sup>th</sup> ed., Vol II). Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, I. (2016). Mengikis Perilaku Korupsi pada Birokrasi Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, 42(1), 29-38.
- Setyorini, D., & Faizal, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Whistleblowing Intention Menggunakan Graham's Model. *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 66-79.
- Shawver, T. J., & Shawver, T. A. (2018). *The Impact of Moral Reasoning on Whistleblowing Intentions*. Emerald Publishing Limited.
- Skinner, B. F. (1958). Reinforcement Today. *American Psychologist*, 13(3), 94-99.
- Spink, J. (2017). Food Fraud Prevention Shift the Food Risk Focus to Vulnerability. *In Trends in Food Science and Technology*, 62, 215-220.

<https://doi.org/10.1016/j.tifs.2017.02.2012>

- Stolowy, H., Gendron, Y., Moll, J., & Paugam, L. (2019). Building the legitimacy of whistleblowers: A multi-case discourse analysis. *Contemporary Accounting Research*, 36(1), 7–49. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12453>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbhi, S. (2019). Fraud Detection during Money Transaction and Prevention. *IEEE International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques*, ICICT 2019. <https://doi.org/10.1109/ICICT46931.2019.8977668>
- Survana, L. (2021). *Pengaruh Authentic Leadership, Retaliation Demediasi Ppsychological Safety Terhadap Internal Intensi Melakukan Whistleblowing Studi Empiris pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau (Skripsi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau)*. <http://repository.uin-suska.ac.id/35289/>
- Survei Fraud Indonesia. (2019). Fraud Detection during Money Transaction and Prevention. *IEEE International Conference on Issues and Challenges in Intelligent Computing Techniques*, ICICT 2019. <https://doi.org/10.1109/ICICT46931.2019.8977668>
- Theodorus, M., & Tuanakotta, (2014). *Akuntansi Forensi dan Audit Investigatis*. (2<sup>nd</sup> ed., Vol I). Jakarta: Salemba Empat
- Teichmann, F. M., & Falker, M. C. (2020). Whistleblowing Incentives. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 394-405. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0132>
- Utami, I., Jori, A., & Hapsari, A. N. S. (2017). Sudikah Akuntan Mengungkap Aib Kecurangan?. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 458-469. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7066>
- Wainberg, J., & Perreault, S. (2016). Whistleblowing in Audit Firms: Do Explicit Protections from Retaliation Activate Implicit Threats of Reprisal?. *Behavioral Research in Accounting*, 28(1), 83-93. <https://doi.org/10.2308/bria-51122>
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The Fraud Diamond Considering The Four Element Fraud . *The CPA Journal*, 74(12), 38– 42.
- Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 3(1), 93– 104.
- Zulkifli, N. F. R. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Online pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax*

*Transformation*, 2(5), 638–649.  
<https://doi.org/10.46799/journalsyntaxtransformation.v2i5.276>

### MATRIKS DAFTAR PUSTAKA

Deskripsi	Kuantitas	Persentase
Jurnal dari 8 tahun terakhir	61	66%
Lainnya	31	34%



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI